



# Mata Pencaharian Kami Hilang

## ■ Pelaku Usaha Skuter Listrik Adukan Larangan Operasional ke LBH

**YOGYA, TRIBUN** - Puluhan pelaku usaha skuter listrik di Kota Yogyakarta mengadu ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Jumat (22/7). Hal ini dilakukan setelah Pemerintah Kota (Pemkot) melarang skuter listrik beroperasi di kawasan Malioboro.

Mereka membawa sejumlah tuntutan, salah satunya mendesak agar pemerintah membiarkan skuter listrik tetap beroperasi di Kota Yogyakarta.

Ketua Paguyuban Skuter Jalan Mangkubumi, Sumantri, mengatakan, usaha skuter listrik sendiri muncul sebagai respons atas pandemi Covid-19 yang berkepanjangan. Skuter listrik di sekitar Jalan Mangkubumi baru muncul sekitar Desember 2021 lalu.

"Saat itu tidak ada masalah lain dan apapun. Dari pemerintah tidak melarang, dan tidak juga mengizinkan," ujar Sumantri di Kantor LBH Yogyakarta, Jumat (22/7).

Kemudian, berselang tiga bulan sekitar Maret 2022, muncul Surat Edaran (SE) Gubernur terkait pelanggaran aktivitas skuter listrik tersebut di Jalan Margo Utomo dan Margo Mulya.

"Nah munculnya SE ini sangat mendadak yang kami sebagai pelaku usaha tanpa diajak bicara, dipanggil atau diundang untuk duduk bersama menyikapi permasalahan yang ada dan tahu-tahu muncul surat edaran. Ini jelas bahasa kasarnya itu membunuh mata pencaharian kami," tuturnya.

Sumantri mengatakan, sebenarnya paguyuban sudah pernah diajak untuk duduk bersama oleh Dinas Perhubungan dan Satpol PP DIV. Namun pertemuan itu tidak menyelesaikan masalah sebab tak ada solusi yang dilahirkan.

"Karena ketika berhadapan dari Dishub maupun Satpol PP tidak bisa menerima argumen dari kami dengan alasan mereka hanya menjalankan tugas. Selama ini kami hanya dibenturkan oleh Satpol PP yang di lapangan," terangnya.

Ketua Paguyuban Skuter Mataram Malioboro, Agus Riyanto, menuturkan aktivitas skuter di Malioboro

- TUAI POLEMIK**
- Puluhan pelaku usaha skuter listrik dimengadu ke LBH, Jumat (22/7).
  - Pengelola berharap skuter listrik tetap bisa beroperasi di kawasan Malioboro.
  - LBH Yogyakarta terima aduan para pelaku usaha tersebut.
  - Pemkot Yogya akan menindak tegas para pelaku yang tetap bandel.

juga baru mulai muncul pada Desember tahun lalu. Berawal di Jalan Perwalian kemudian berkembang ke sayap-sayap sekitaran Malioboro.

"Dulu pernah dari dinas terkait diinisiasi oleh Polresta, Dishub, dan Satpol PP Kota. Paguyuban skuter dipertemukan dan dari sana ketemu beberapa poin di antaranya dari pihak kota ada yang poin yang tidak mengizinkan tapi juga tidak melarang. Jadinya di situ posisi kita ya *wees morogo* (slakan) yang penting beroperasi waktu itu," kata Agus.

Ia mengatakan bahwa dari pertemuan itu juga sempat didapatkan poin lain terkait keamanan yakni dengan memakai helm. Serta terkait kecepatan dan tempat area beroperasi yaitu Malioboro dan Jalan Mangkubumi.

Kemudian, berkembangnya waktu lagi sampai dengan saat ini skuter listrik tidak diizinkan untuk beroperasi di lokasi wisata Malioboro. Bahkan juga terancam tidak boleh beroperasi di seluruh Kota Yogyakarta.

"Tentu saja ini sangat tidak disukai oleh teman-teman karena itu nasib kita seperti apa, baru saja kita merasakan dapat pemasukan dari penyewaan itu terus sekarang langsung dihentikan," ucapnya.

Kepala Divisi Penelitian Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, Era Harera, menyatakan pada prinsipnya LBH Yogyakarta menerima aduan dari pelaku usaha skuter listrik. Untuk selanjutnya melakukan sejumlah upaya untuk memperjuangkan hak dari mereka.

"Pada prinsipnya kami lembaga bantuan hukum Yogyakarta menerima aduan dari teman-teman skuter listrik dan harapan kami ke

depan kita bisa bersama-sama untuk mengupayakan dan memperjuangkan dari teman-teman skuter listrik ini," kata Era.

Era menjelaskan, langkah pertama yang akan dilakukan adalah dengan berupaya untuk nonmitigasi terlebih dahulu. Terdekat, pihaknya akan segera melakukan audiensi dengan Gubernur DIY.

"Tadi juga muncul poin-poin seperti kita akan melakukan audiensi langsung dengan Gubernur di minggu depan ini. Harinya nanti akan dibahas lebih lanjut lagi dengan teman-teman mengenai bagaimana teknisnya," pungkasnya.

**Tindakan tegas**  
 Penjabat (PJ) Wali Kota Yogyakarta, Sumadi, sebelumnya menegaskan, pihaknya sudah memberi instruksi pada jajaran Satpol PP agar ambil tindakan. Ia pun tak dapat menyembunyikan kegeraman, karena larangan operasional sebenarnya sudah sangat jelas.

"Sudah dilarang, tapi tetap ngeyel, kemarin sudah dirazia juga sebenarnya. Sekarang, saya minta, *mok yo ojo ngono kuno!* Kalau kami tindak benar, harus diangkut, nanti dia *begok-begok* lagi. Toh, Ngarsa Dalem juga sudah mengeluarkan edaran, taati saja," katanya.

Sumadi menegaskan, Peraturan Wali Kota (Perwal) tentang larangan operasional skuter listrik saat ini sudah rampung pembahasannya. Namun, Perwal belum bisa disahkan, lantaran menanti persetujuan Kemendagri.

"Saya berharap akhir bulan ini selesai, karena prosesnya butuh waktu paling tidak dua minggu. Nanti, di Perwal ada konsekuensi sanksinya juga. Sehingga, setelah disahkan, tidak ada ruang pelanggaran lagi," ucapnya. **(hda/aka)**



**BERIRINGAN** - Para pelaku usaha skuter listrik iring-iringan setelah mengadu ke LBH Jogja, Jumat (22/7). Mereka mengadukan kebijakan Pemkot untuk melarang skuter listrik beroperasi di kawasan Malioboro.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Juni 2026  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005